

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Suriyaman Mustari Pide. 2022. *Hukum Adat dahulu, kini, dan akan datang*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Achmad Ali. 2013. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan Volume 1 Pemahaman Awal*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Hafid. 2013. *Ammatoa Dalam Kelembagaan Komunitas Adat Kajang*. Makassar: De La Macca.
- Agusta Pinta Kurnia Rizky. dan Aris Prio Agus Santoso. 2022. *Pengantar Hukum Adat*. Yogyakarta: Pustakabarupress.
- Abdul Haris Sambu. 2016. *Sejarah Kajang*. Sulawesi Selatan: Yayasan Pemerhati Sejarah.
- A. Hamid Sarong. 2010. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan peNA Banda Aceh.
- Hilman Hadi Kusuma. 1977. *Hukum Perkawinan Adat*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Erdianto Effendi. 2018. *Hukum Pidana Adat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- H. Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- H. Abdul Rahman Ghazaly. 2019. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- I Gede A.B. Wiranata. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhammad Syaifuddin. Sri Turatmiyah. dan Annalisa Yahanan. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Nashrun Jauhari. 2019. *Hukum Perkawinan dan Kewarisan Adat*. Malang: Literasi Nusantara.
- Nunuk Sulisrudatin. Lindri Purbowati. dan Rara Amalia Cendhayanie. 2023. *Hukum Adat di Indonesia*. Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Group.
- Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: Alumni.
- Rosdalina Bukido. 2017. *Hukum Adat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- St. Laksanto Utomo. 2019. *Hukum Adat*. Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Sri Warjiyati. 2020. *Ilmu Hukum Adat*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Sri Hajati. et al. 2018. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta Timur: Kencana
- Soerojo Wignjodipoero. 1985. *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Supriadi Takwim. 2021. *Kearifan Lokal Suku Kajang dalam Penataan Ruang*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Susi Fitria Dewi, et al. 2022. *Resolusi Konflik Berbasis Kearifan Lokal*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

H.P. Panggabean. 2022. *Praktik Peradilan Menangani Kasus-Kasus Hukum Adat Suku-suku Nusantara*. Jakarta: Bhuana Ilmu Populer.
Zainuddin Tika, et al. 2019. *Ammatoa*. Gowa: Pustaka Taman Ilmu

Jurnal

- Andi Erwin Hamzah, Andi Suriyaman Mustari Pide, dan Kahar Lahae. 2023. *Pengadaan Tanah Terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Teluk Wondama*. Jurnal Papua Law Journal. Volume 7 Issue 2. Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.
- Dwi Laksa Marabintang, Andi Suriyaman M. Pide, dan Muhammad Ilham Arisaputra. 2022. *Balik Nama pada Sertifikat yang Mengandung Unsur Perbuatan Melawan Hukum*. Jurnal Hukum Widya Yuridika. Volume 5 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Widyagama Malang.
- Alfredy, Sri Susyanti Nur, dan Muhammad Ilham Arisaputra. 2022. *Aspek Hukum Tanah Tongkonan Sebagai Harta Pusaka yang Tidak Terbagi*. Jurnal Amanna Gappa. Volume 30 Nomor 02. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Albert Aruan. 2024. *Peranan Teori Keputusan dalam Hukum Adat*. Jurnal.ensiklopediaku.org. Volume 6 Nomor 2. Fakultas Hukum Universitas Trisakti Jakarta.
- Verlyta Swislyn. 2018. *Pembagian Harta Bersama dalam Perceraian Suku Batak Toba yang Menganut Kepercayaan Parmalim*. Jurnal Nuansa Kenotariatan. Volume 4 Nomor 1. Fakultas Hukum Universitas Jayabaya,
- Risfaisal, dkk. 2022. *Sistem Penyelesaian Kasus pada Masyarakat Adat Kajang Ammatoa Kabupaten Bulukumba*. Jurnal Pendidikan. Volume X. Issu 2. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Makassar.

Tesis

- Idrus. 2004. *Hukum Waris Adat Komunitas Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Gadjadarda.
- Nur Qonita Syamsul. 2020. *Eksistensi Penyelesaian Sengketa Secara Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Suwatno. 2010. *Pembagian Harta bersama akibat perceraian menurut hukum adat jawa di kecamatan tarub kabupaten tegal*. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Perundang-undangan

- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Undang-undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan. Pengakuan hak. dan Perlindungan hak masyarakat hukum adat ammatoa kajang.

Wawancara

Wawancara dengan Ammatoa. Kepala Adat Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Pada Tanggal 8 Agustus 2023

Wawancara dengan Ismail. Pemandu wisata adat dan budaya ammatoa, pada tanggal 3 Agustus 2023.

Wawancara dengan Zulkarnain. Kepala Desa Tana Towa, Kec. Kajang, Kab. Bulukumba. Pada tanggal 22 februari 2024

Wawancara dengan Toa Pa'galung. Pemangku Adat Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Pada Tanggal 20 Mei 2024

Wawancara dengan Galla Puto. Pemangku Adat Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Pada Tanggal 30 April 2024

Wawancara dengan Puto Pate. Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Pada Tanggal 20 Mei 2024.

Wawancara dengan Alim Bahri. Staff Pada Pengadilan Agama Bulukumba. Pada Tanggal 15 Mei 2024.

Wawancara dengan Andi Abdul Samad DM. Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Pada Tanggal 20 Mei 2024

Wawancara dengan Salmawati. Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Pada Tanggal 20 Mei 2024

Wawancara dengan Galla' Pattongko. Pemangku Adat Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Pada Tanggal 20 Mei 2024

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

KAMPUS TAMALANREA JL. PERINTIS KEMERDEKAAN KM. 10 MAKASSAR 90245
TELP : (0411) 584 686, 587 219 e-mail : hukum@unhas.ac.id

Nomor : 1616/UN4.5.1/PT.01.04/2024
Lampiran : Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian

08 Mei 2024

Yth. : **Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (DPMPSTP) Prov. Sulawesi Selatan**
di
Makassar

Dengan hormat, dalam rangka penyusunan dan penulisan **Tesis (S2)** Magister
Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, kiranya mahasiswa tersebut
dibawah ini:

Nama : **Nurmayasari**
Nomor Pokok : **B022222004**
Program : **Magister (S2) Kenotariatan**
Judul Penelitian : **Eksistensi Kepatuhan Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang
Dalam Menyelesaikan Harta Bersama Pasca Putusnya Perkawinan**

Penasihat : **Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari Pide, S.H., M.H.** Pembimbing Utama
Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H., M.H. Pembimbing Pendamping
Waktu Penelitian : **Mei 2024 s.d. Selesai**

Mohon bantuan kemudahan proses pengambilan data dan informasi untuk kepentingan
penyelesaian studi mahasiswa yang bersangkutan.
Atas perkenaan dan bantuan saudara diucapkan terima kasih.



Prof. Dr. Maskun, S.H., LL.M.
NIP. 19761129 199903 1005

Tembusan

- 1 KPS S2 Kenotariatan Fakultas Hukum Unhas
- 2 Sdr. Nurmayasari
- 3 Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(D P M P T S P)**

Jl. Kenari No. 13 Telp. (0413) 84241 Fax. (0413) 85060 Bulukumba 92511

**SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 073/DPMTSP/IP/II/2024**

Berdasarkan Surat Rekomendasi Teknis dari KESBANGPOL dengan Nomor: 074/0086/Bakesbangpol/II/2024 tanggal 20 Februari 2024, Perihal Rekomendasi Izin Penelitian maka yang tersebut dibawah ini :

Nama Lengkap	: Nurmayasari
Nomor Pokok	: B02222004
Program Studi	: Magister kenotariatan
Jenjang	: Magister (S2)
Institusi	: Universitas Hasanuddin
Tempat/Tanggal Lahir	: Tarailu / 1999-09-08
Alamat	: Desa Tarailu, kecamatan sampaga, kabupaten mamuju
Jenis Penelitian	: Normatif - Empiris
Judul Penelitian	: Aspek hukum penyelesaian harta bersama masyarakat adat ammatoa kajang pasca putusnya perkawinan desa Tana Toa kec. Kajang, kab. Bulukumba
Lokasi Penelitian	: Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari pide, S.H.,M.H dan Dr. Andi Syahwiah A. Sapiddin, S.H.,M.H
Pendamping	: Kantor kepala desa tana toa kec. Kajang, kabupaten Bulukumba
Instansi Penelitian	: tanggal 17 februari 2024 s/d 17 maret 2024
Lama Penelitian	

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, pada prinsipnya kami mengizinkan yang bersangkutan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi semua Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat - istiadat yang berlaku pada masyarakat setempat;
2. Tidak mengganggu keamanan/ketertiban masyarakat setempat
3. Melaporkan hasil pelaksanaan penelitian/pengambilan data serta menyerahkan 1(satu) eksamplar hasilnya kepada Bupati Bulukumba Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Bulukumba;
4. Surat izin ini akan dicabut atau dianggap tidak berlaku apabila yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut di atas, atau sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan kegiatan penelitian/pengumpulan data dimaksud belum selesai.

Dikeluarkan di : Bulukumba
Pada Tanggal : 21 Februari 2024



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 11708/S.01/PTSP/2024
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Bupati Bulukumba

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar Nomor : 1616/UN4.5.1/PT.01.04/2024 tanggal 08 Mei 2024 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : NURMAYASARI
Nomor Pokok : B022222004
Program Studi : Kenotariatan
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S2)
Alamat : Jl. P. Kemerdekaan Km. 10 Makassar

PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun Tesis, dengan judul :

" ASPEK HUKUM PENYELESAIAN HARTA BERSAMA MASYARAKAT ADAT AMMATOA
KAJANG PASCA PUTUSNYA PERKAWINAN "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 13 Mei s/d 13 Juli 2024

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 13 Mei 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. Dekan Fak. Hukum UNHAS Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*